

FAST FASHION DAN BUDAYA KONSUMERISME DI INDONESIA: TINJAUAN MELALUI PERSPEKTIF GREEN THEORY

Fadhel Muhammad¹, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: May 2025

Revised: May 2025

Accepted: May 2025

Available online

Korespondensi: Email:

captnemo312@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute.

Abstrak

Fast fashion, sebagai bagian dari globalisasi budaya, telah memicu peningkatan signifikan terhadap pola konsumsi yang tidak berkelanjutan, terutama di kalangan masyarakat urban Indonesia. Industri *fast fashion* yang memberikan kemudahan untuk mengakses produk pakaian yang terjangkau menimbulkan gaya hidup konsumtif yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Melalui sudut pandang *green theory* kemudian memberikan kerangka normatif untuk mengkaji relasi antara dominasi budaya konsumerisme dengan degradasi lingkungan. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis melalui *review* literatur. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *fast fashion* bukan hanya berkontribusi terhadap peningkatan limbah tekstil dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga mereproduksi struktur konsumsi yang tidak kritis terhadap dampak ekologis. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan reformulasi kebijakan publik untuk mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: *Fast fashion*, konsumerisme, teori hijau, lingkungan.

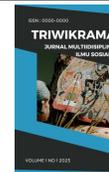
Abstract

Fast fashion, as a manifestation of cultural globalization, has accelerated unsustainable consumption patterns, particularly in urban Indonesia. This industry offers rapid access to affordable clothing but simultaneously contributes to environmental degradation. Employing the normative framework of *green theory*, this study critically examines the correlation between consumerist culture and ecological damage. Utilizing a qualitative descriptive method based on literature review, findings reveal that *fast fashion* not only generates vast textile waste and overexploits natural resources but also reinforces uncritical consumption behaviors. The study underscores the necessity of policy reform and collective awareness to foster more responsible and sustainable consumption in Indonesia.

Keywords: *Fast fashion*, consumerism, green theory, environmental.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi isu lingkungan yang kian hari semakin kompleks. Isu perubahan iklim, kerusakan ekosistem, hingga degradasi kualitas hidup manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bersamaan dengan itu, peningkatan signifikan dari gaya hidup konsumsi yang berlebihan juga turut serta memperburuk kerusakan lingkungan, tak terkecuali di Indonesia. Tingginya aktivitas manusia berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat yang disebabkan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat (Almeisa & dkk, 2024, p. 2). Salah satu negara penghasil sampah plastik dan

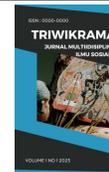


termasuk juga sampah tekstil terbesar di dunia adalah Indonesia. Hal ini perlu kita pahami bahwa dengan menjadi salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar, kita perlu menekan produksi sampah di Indonesia. Hal ini juga berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, penumpukan sampah berlebihan dapat menjadi sarang virus dan bakteri yang menjadi sumber dari berbagai penyakit. Bahkan di beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia, berbatasan langsung dengan pemukiman warga, seperti TPA Piyungan di Yogyakarta, TPA Bantar Gebang di Bekasi, serta TPA Antang di Makassar. Pemukiman yang berbatasan dengan langsung menjadi bukti kesenjangan sosial dalam mencapai lingkungan yang layak untuk ditinggali masyarakat.

Di tengah berbagai masalah lingkungan yang ada di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah *green theory* yang muncul sebagai pendekatan kritis yang menawarkan suatu alternatif terhadap paradigma Pembangunan eksploitatif yang mendominasi. Sementara itu, pengembangan *green theory* di Indonesia kerap menghadapi hambatan. Salah satu hambatan utamanya adalah gaya hidup konsumerisme yang mendominasi masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam mengatasi masalah lingkungan termanifestasikan dalam pola konsumsi terhadap produk sehari-hari (Berlian, 2024, p. 3). Gaya hidup konsumerisme sangat mendorong pola produksi dan konsumsi yang berlebihan bahkan cenderung boros, serta menimbulkan nilai individualis yang berkontradiksi dengan keberlangsungan lingkungan. Penggunaan barang sekali pakai, kemasan makanan dan minuman yang tidak berfokus kepada keberlangsungan lingkungan, serta penggunaan zat-zat yang tidak ramah lingkungan menjadi ciri-ciri dari gaya hidup konsumerisme yang berdampak langsung dengan keamanan lingkungan hidup. Kesederhanaan yang menjadi panutan hidup bagi masyarakat Indonesia, perlahan mulai ditinggalkan dengan alasan dianggap sebagai bentuk keterbelakangan pikiran. Budaya konsumerisme di Indonesia juga lekat hubungannya dengan pertumbuhan globalisasi yang cepat di Indonesia. Para generasi muda yang selalu ingin mengikuti *trend* yang sedang berlaku adalah dampak dari globalisasi yang menyeluruh di seluruh belahan dunia.

Pendekatan *green theory* digunakan sebagai landasan teoritis dan kritis antara aktivitas sosial, keadilan lingkungan, serta keamanan manusia. Segala sesuatu yang kemudian berdampak besar pada lingkungan bisa terjadi apabila tidak dilandasi dengan kesadaran tentang kelestarian lingkungan. Tingginya penggunaan sumber daya alam juga harus dilandasi dengan pembaharuan alam, seperti deforestasi hutan yang kemudian dilanjuti dengan penanaman hutan kembali, penggalan lahan yang diikuti dengan penimbunan kembali. Dengan begitu, manusia yang secara unik menjadi ekosistem dari lingkungan telah melakukan upaya untuk menjaga stabilitas alam. Penggunaan sumber daya alam juga harus memikirkan jumlah yang diperlukan, tanpa melakukan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Sehingga ketersediaan sumber daya alam untuk masa yang akan datang tetap terjaga.

Fenomena ini juga dikukuhkan oleh hadirnya suatu kerangka pembangunan ekonomi pada pertumbuhan material yang tidak berorientasi terhadap pertimbangan daya dukung ekologis. Akibat dari fenomena tersebut, upaya praktis dan kebijakan terhadap pengembangan *green theory* seringkali terabaikan. Selain itu juga, sebagian besar wacana lingkungan di Indonesia belum mencapai aspek ideologis maupun struktural yang ditawarkan oleh *green theory*, melainkan masih cenderung bersifat teknokratis. Penerapan perspektif *green theory* di dalam sistem sosial masyarakat bukanlah suatu bentuk revolusi. Hal ini dikarenakan penerapan perspektif *green theory* tidak menentang suatu bentuk pemerintahan dan tidak menimbulkan perubahan radikal yang berlangsung sangat cepat dan secara tiba-tiba (Ashri & Putri, 2022, p. 6). Dengan demikian, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk bisa memahami tentang



budaya konsumerisme yang bukan hanya menjadi masalah ekologis, tetapi juga menjadi tantangan epistemologis dalam pengembangan teori kritis lingkungan di Indonesia. Maka dari itu, penulis membuat penelitian dengan tujuan untuk mengkaji seberapa berpengaruhnya ideologi konsumerisme terhadap penerimaan, penerapan, dan pengembangan *green theory* di Indonesia.

Rumusan masalah utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah bagaimana ideologi konsumerisme yang tercermin dalam praktik *fast fashion* mempengaruhi keberterimaan dan penerapan *green theory* di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk ditelaah karena konsumsi bukan lagi sekadar tindakan ekonomi, melainkan sebuah ekspresi budaya dan ideologi yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam dan keberlanjutan. Di sisi lain, *green theory* hadir sebagai wacana tanding yang menantang dominasi narasi pembangunan eksploitatif dengan menawarkan pendekatan etik dan ekologis yang lebih berimbang. Sayangnya, dalam konteks Indonesia, diskursus lingkungan masih berkuat pada tataran teknis dan belum mencapai lapisan ideologis maupun struktural sebagaimana yang ditawarkan oleh *green theory*.

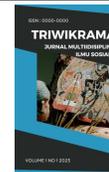
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali secara kritis relasi antara budaya konsumtif dalam masyarakat urban Indonesia dengan tantangan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diajukan oleh *green theory*. Fokus kajian tidak hanya pada aspek lingkungan fisik, tetapi juga pada dinamika sosial, politik, dan ideologis yang membentuk perilaku konsumsi dan praktik industri *fashion* di Indonesia. Relevansi kajian ini menjadi semakin penting di tengah masifnya ekspansi industri *fast fashion* global yang mempercepat siklus produksi dan konsumsi pakaian tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis. Penelitian ini juga diharapkan mampu menawarkan sudut pandang alternatif dalam membaca relasi antara pembangunan ekonomi, kebijakan konsumsi, dan keberlanjutan ekologis melalui lensa teori kritis lingkungan

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap 20 artikel ilmiah dan sumber literatur relevan lainnya yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2017-2024. Kriteria inklusi mencakup jurnal yang membahas tentang *fast fashion*, konsumerisme, dan *green theory* baik dalam konteks Indonesia maupun global. Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, yang memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dari isi teks secara sistematis guna menemukan pola-pola tematik yang berkaitan dengan dampak budaya konsumtif terhadap lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap relasi antara ideologi konsumsi dan tantangan ekologis kontemporer

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gaya hidup konsumerisme sangat berkorelasi dengan kesehatan lingkungan, terutama di Indonesia. Pola hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan tempat masyarakat bermukim. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang sedang melakukan proses konsumsi, transaksi, ataupun pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepatutnya secara sadar dan berkelanjutan (Ramadhan, 2023, p. 3). Di Indonesia sendiri, fenomena tersebut telah berkembang pesat secara kultural maupun teknis. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi serta kemudahan dalam mengakses terhadap suatu produk sehingga dapat menaikkan taraf hidup masyarakat. Namun dilain sisi, dengan pola konsumsi yang tidak ramah lingkungan dari masyarakat yang

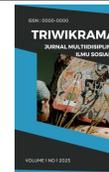


meningkat secara signifikan, dapat mendorong terjadinya masalah lingkungan, pencemaran alam, dan meningkatnya potensi terjadinya bencana ekologis.

A. Konsumerisme dan *Fast Fashion*

Budaya konsumerisme di Indonesia dapat kita temukan sehari-hari di kehidupan masyarakat. Kebiasaan tersebut kemudian dapat memicu timbulnya masalah isu lingkungan. Selain itu juga, konsumerisme dapat mencakup kepada barang sandang, di beberapa wilayah di Indonesia, gaya berpakaian banyak dijadikan sebagai patokan umum untuk status sosial maupun keuangan, sehingga banyak masyarakat yang rela membeli berbagai jenis pakaian dalam jumlah besar hanya demi kepentingan status sosialnya. Budaya ini telah mengikis nilai-nilai sosiokultural Indonesia dan menganggap bahwa status sosial dapat dilihat seberapa banyak kita dapat membeli dan mengkonsumsi barang-barang berlebihan yang tidak perlu. Budaya konsumtif sering kali mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu keberlanjutan. Dalam upaya untuk mengikuti tren konsumsi, banyak individu yang mengabaikan dampak lingkungan dari gaya hidup mereka (Ruslita & Seran, 2024, p. 9). Konsumerisme yang berawal dari hanya sebagai gaya hidup, kemudian beranjak menjadi ideologi dan lazim digunakan oleh masyarakat menengah ke atas yang menjadikan tingkat konsumsi barang menjadi ajang dalam memamerkan sebuah status sosial. Budaya konsumtif yang menjadi gaya hidup kemudian berkembang menjadi suatu ideologi, adalah bentuk perkembangan dari ideologi neoliberalis yang digunakan oleh kebanyakan kaum kelas atas. Dengan begitu, kesenjangan sosial yang terjadi dapat menjadi lebih luas dan menghasilkan jarak yang begitu lebar terhadap kaum kelas menengah ke bawah dengan kaum kelas atas. Kesenjangan sosial yang dihadapi dapat memicu terjadinya konflik yang secara tidak langsung dapat menjadi ancaman bagi keamanan masyarakat di Indonesia.

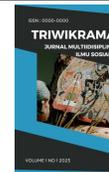
Budaya konsumerisme yang semakin berkembang di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kuat globalisasi yang telah mengubah cara masyarakat dalam mengonsumsi gaya berpakaian. Globalisasi membuka pintu bagi interaksi lintas negara, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga budaya, sehingga pola pikir masyarakat Indonesia mengenai *fashion* mengalami perluasan yang signifikan. Terbukanya akses terhadap berbagai produk dan *trend* dari seluruh penjuru dunia membuat masyarakat Indonesia tidak hanya sekadar menjadi konsumen pasif, tetapi juga aktif menyesuaikan diri dengan perubahan gaya berpakaian yang dinamis. Akibatnya, budaya konsumtif yang awalnya lebih sederhana berkembang menjadi sebuah fenomena yang meluas dan mendalam, khususnya dalam ranah *fashion*. Selain itu, kemajuan teknologi dan munculnya media digital sebagai sumber informasi utama turut mempercepat laju budaya konsumtif ini. Dengan kehadiran platform digital seperti media sosial, aplikasi berbagi foto, dan *marketplace online*, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses berbagai *trend fashion* terbaru dari berbagai belahan dunia secara *real-time*. Hal ini menimbulkan semacam tekanan sosial yang mendorong individu untuk selalu mengikuti apa yang sedang *viral*, agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Fenomena ini menjadi semakin kuat karena media digital tidak hanya menampilkan tren, tetapi juga membentuk persepsi tentang gaya hidup ideal yang diidolakan oleh masyarakat luas. Salah satu faktor yang memperkuat dinamika ini adalah keberadaan industri *fast fashion*, yang menawarkan pakaian dengan harga terjangkau dan desain yang selalu *update* mengikuti *trend global*. Industri ini mampu menjembatani antara keinginan konsumen untuk tampil modis dengan keterbatasan daya beli, sehingga membuat akses terhadap pakaian modis menjadi lebih mudah dan cepat. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak negatif, yaitu meningkatnya dorongan masyarakat untuk terus-menerus membeli pakaian baru, seringkali tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan maupun kualitas produk. Budaya konsumtif yang berkembang



cenderung didorong oleh rasa takut kehilangan relevansi dalam lingkup sosial, di mana mengikuti tren mode menjadi semacam kewajiban sosial.

Dalam konteks ekonomi global kontemporer, terdapat kecenderungan dominan di mana negara-negara *global north* memanfaatkan mekanisme perdagangan internasional sebagai instrumen untuk menjaga dan memperluas pertumbuhannya. Salah satu strategi yang paling menonjol adalah dengan mendorong ekspansi pasar produk-produk mereka, termasuk dalam sektor *fast fashion*, ke wilayah-wilayah *global south*. Strategi ini bukan hanya dilandasi oleh motif ekonomi, tetapi juga oleh kalkulasi geopolitik, di mana negara *global north* berusaha mempertahankan posisi hegemoniknya melalui penetrasi pasar di negara-negara berkembang. *Fast fashion* adalah bentuk upaya dari negara *global north* untuk menaikkan ekonomi mereka dengan melakukan penjualan ke negara-negara *global south*. Perusahaan pakaian seperti *H&M*, *Uniqlo*, serta *Zara*. Pakaian yang berasal dari industri tersebut merupakan salah satu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat untuk meningkatkan gaya hidup. Kemudahan dalam mengakses membuat *fast fashion* secara signifikan menaikkan budaya konsumtif masyarakat. Dengan hidup dalam dunia yang serba cepat, barang dari *fast fashion* akan menyediakan pakaian dengan lebih terjangkau (Hakim & Rusadi, 2022, p. 4). Dilain sisi, produksi masif dari industri *fast fashion* membuatnya menjadi penyumbang sampah tekstil terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Industri tersebut turut menyumbang sampah tekstil melalui produksi serta penggunaan bahan sintesis yang tidak ramah lingkungan. Bersamaan dengan itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang efek dari produksi tersebut, membuat kesadaran tentang sampah yang diproduksi dari industri menjadi terabaikan, sehingga masyarakat Indonesia tetap menggemari dan kian mengonsumsi produk-produk dari *fast fashion* dalam jumlah yang besar dan berkelanjutan. Terlepas dari meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungannya, industri *fast fashion* terus memproduksi pakaian murah, yang menyebabkan lonjakan limbah tekstil yang pada akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir dan tempat yang tidak diatur (Basiroen, Wahidiyat, & Anjanette, 2023, p. 14). Sehingga industri *fast fashion* melalui pandangan pemikir sosial, sangat lekat kaitannya dengan budaya konsumsi yang berlebihan dan tidak berkelanjutan.

Budaya konsumerisme telah menjadi fenomena sosial yang memicu beragam reaksi dan kritik dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis lingkungan hingga para pemikir sosial yang memandang dampaknya secara mendalam. Konsumerisme dipandang sebagai suatu pola pikir dan tindakan orang yang membeli barang bukan karena membutuhkan sesuatu barang, melainkan karena mencari kepuasan dari tindakan membeli itu sendiri (Zahrawati & Faraz, 2017, pp. 131-141). Secara implisit, budaya ini berpotensi mengikis nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi landasan kehidupan yang lebih bermakna dan efisien. Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang secara historis dikenal dengan gaya hidup yang sederhana dan mengutamakan fungsi atau kegunaan barang, perubahan yang terjadi akibat budaya konsumsi berlebihan ini terasa cukup signifikan. Nilai kesederhanaan yang selama ini memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya, serta dalam meminimalisasi pemborosan, secara perlahan mulai tergantikan oleh dorongan untuk memiliki lebih banyak barang yang terkadang hanya sekadar memenuhi aspek status sosial atau tren semata. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara individu memandang dan menggunakan barang, tetapi juga pada cara masyarakat secara kolektif memandang keberlanjutan lingkungan dan sosial. Gaya hidup konsumeristik yang cenderung berorientasi pada kepuasan sesaat dapat memicu eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali serta menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang merusak ekosistem. Menanggapi realitas ini, telah muncul berbagai gerakan sosial yang mengadvokasi pola hidup yang lebih sederhana, minimalis, dan berkelanjutan. Gerakan-gerakan



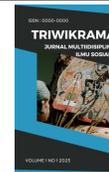
tersebut menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk mengurangi konsumsi yang tidak perlu dan menempatkan keberlangsungan lingkungan sebagai prioritas utama. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam memilih dan mengelola konsumsi mereka, tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi kelestarian planet ini bagi generasi mendatang.

B. Implikasi Terhadap Lingkungan dan Perspektif *Green Theory*

Industri *fast fashion* merupakan penghasil sampah tekstil terbesar di dunia. Seperti halnya dengan jenis sampah yang lain, sampah tekstil juga turut serta dalam pencemaran lingkungan. Tekstil yang diproduksi oleh industri *fast fashion* banyak menggunakan sumber daya alam secara masif serta sebagian besar menghasilkan tekstil berbahan sintetis yang kurang ramah terhadap lingkungan. Akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan, mulai dari polusi air akibat pembuangan limbah tekstil hingga emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim (Albab & dkk, 2024, p. 2). Dengan membatasi eksploitasi sumber daya alam yang masif, itu akan berdampak terhadap generasi selanjutnya. Hal ini semata mata dilakukan untuk menjaga kestabilan *supply and demand* dari sumber daya alam itu sendiri.

Jika kita melihat dari sudut pandang ekologis, justru yang dapat kita temukan adalah ketidakadilan serta krisis ekologis. Selain menghasilkan limbah yang berbahaya, produksi dari industri *fast fashion* juga menggunakan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesediaan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Proses produksi pakaian, terutama dalam tahap pewarnaan dan pencucian membutuhkan volume air yang sangat besar (Safitri, 2025, p. 4). Selain *input* dari produksi yang membutuhkan sumber daya alam yang masif, *output* yang dihasilkan juga tingginya tingkat pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini mencakup pencemaran air, udara, maupun tanah. Sumber daya alam akan menjadi lebih langka karena populasi yang padat, dan teknologi akan digunakan untuk menjarah alam tanpa terkendali, sehingga menurunkan kualitas lingkungan (Majid & Tidore, 2024, p. 2). Pencemaran ini kemudian dapat berdampak terhadap kebutuhan masyarakat serta keamanan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi industri *fast fashion*.

Salah satu aspek krusial yang jarang disadari oleh konsumen dalam menyikapi pesatnya perkembangan industri *fast fashion* adalah pemilihan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi pakaian. Di antara berbagai jenis tekstil yang digunakan, *polyester* menempati posisi paling dominan. *Polyester* merupakan serat sintetis yang diproduksi secara kimiawi dari senyawa berbasis minyak bumi, dengan kandungan utama berupa plastik jenis *polyethylene terephthalate* (PET). Popularitas bahan ini dalam industri *fashion* sangat tinggi karena sifatnya yang ringan, cepat kering, tahan terhadap kerutan, dan relatif murah dalam biaya produksinya. Kelebihan-kelebihan tersebut membuat *polyester* menjadi pilihan utama dalam produksi massal pakaian modern, khususnya dalam skema bisnis *fast fashion* yang menuntut efisiensi tinggi dan siklus produksi yang cepat. Namun, di balik segala keunggulannya, *polyester* dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Ketika pakaian berbahan dasar *polyester* dicuci, baik secara manual maupun menggunakan mesin cuci, serat-serat mikro yang dikenal sebagai *microfiber* akan terlepas dan terbawa bersama aliran air limbah. *Microfiber* yang sulit diurai akan memberikan pengaruh yang buruk bagi makhluk hidup (Leman & dkk, 2020, p. 7). Mikroserat ini, meskipun ukurannya sangat kecil dan tak kasat mata, membawa dampak besar dalam jangka panjang. Karena terbuat dari plastik, mikroserat tidak dapat terurai secara alami dan akhirnya mengalir menuju sistem perairan, hingga bermuara di



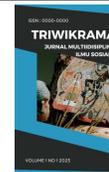
laut dan ekosistem air tawar lainnya. Di sana, partikel-partikel ini menjadi kontaminan mikroplastik yang mencemari perairan dan membahayakan kehidupan laut.

Dalam disiplin ilmu hubungan internasional yang kian berkembang, pendekatan-pendekatan baru terus bermunculan untuk menjawab kompleksitas tantangan global, salah satunya adalah krisis lingkungan hidup yang semakin mendesak. Salah satu pendekatan yang relatif baru namun semakin mendapat perhatian dalam wacana akademik dan kebijakan global adalah *green theory*. Pendekatan ini tidak hanya merekonstruksi cara kita memahami relasi antara negara, aktor non-negara, dan sistem internasional, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai ekologis dalam analisis politik global. *Green theory* hadir sebagai bentuk kritik terhadap paradigma dominan yang selama ini terlalu antroposentris yakni menempatkan manusia sebagai pusat kepentingan tanpa memperhitungkan keseimbangan ekologis secara menyeluruh. Dalam kerangka *green theory*, manusia tidak diposisikan sebagai penguasa atas alam, melainkan sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terkait. Dengan demikian, fokus utama perhatian pada etika lingkungan adalah bagaimana seharusnya manusia bersikap atau bagaimana seharusnya manusia bertindak terhadap lingkungan (Munir, 2023, pp. 8-9). Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan adanya pembatasan terhadap perilaku manusia dalam mengonsumsi dan mengelola sumber daya alam. Bukan karena sumber daya itu terbatas semata, tetapi karena ada tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Di sinilah pentingnya etika lingkungan sebagai dimensi integral dalam teori hijau. Etika lingkungan menyerukan perlunya relasi yang adil antara manusia dan alam, serta mendorong manusia untuk memperlakukan lingkungan bukan sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan layak untuk dilindungi.

Perspektif ini menggeser fokus dari logika ekonomi yang hanya menilai alam dalam ukuran manfaat material dan keuntungan jangka pendek, menuju pada pendekatan etis yang menilai bagaimana perilaku manusia mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup lain dan generasi mendatang. Dalam konteks global, pendekatan ini menantang sistem kapitalisme global yang selama ini mendorong industrialisasi tanpa batas dan konsumsi berlebih. *Green theory* menekankan bahwa kebijakan ekonomi, perdagangan internasional, serta industri global harus mulai mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang tidak hanya berbasis efisiensi, tetapi juga tanggung jawab ekologis. Namun, dalam praktiknya, tantangan besar masih menghambat implementasi prinsip-prinsip *green theory* di level internasional. Salah satu masalah utama adalah dorongan untuk terus memproduksi dan mengonsumsi barang dalam skala besar, yang tidak jarang dilakukan tanpa evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Pola konsumsi yang tidak berkelanjutan ini seringkali dijustifikasi atas nama pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, atau modernisasi teknologi. Akibatnya, kerusakan lingkungan dianggap sebagai risiko eksternal yang bisa diatasi kemudian, bukan sebagai prioritas utama yang harus diintegrasikan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

C. Ancaman terhadap *Human Security*

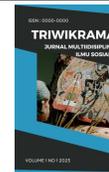
Human Security atau keamanan manusia sejatinya merujuk terhadap keselamatan dari manusia itu sendiri, bukan keselamatan negara. *Human Security* seringkali dikaitkan dengan konflik senjata maupun agresi militer. Lebih dari itu, segala bentuk ancaman terhadap keamanan manusia adalah pokok pikiran dari *human security*. Dalam hal tersebut, negara merupakan objek politik yang memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan menghilangkan ancaman bagi *human security* di dalam wilayah negaranya (Sande, 2021, p. 7). Dalam kerangka ini, keamanan tidak lagi dipandang hanya sebatas perlindungan dari serangan militer atau konflik bersenjata, melainkan mencakup segala bentuk ancaman yang dapat



merusak martabat, hak, dan kehidupan manusia sehari-hari. Ancaman terhadap keamanan manusia bisa tidak selalu bersifat fisik atau kasat mata. Contohnya seperti, kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak dapat menghambat perkembangan individu dan berpotensi memperbesar kesenjangan sosial, kemudian pelanggaran hak asasi manusia bisa menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan yang dapat merusak tatanan masyarakat, lalu isu kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, seperti deforestasi, pencemaran air dan polusi udara, serta perubahan iklim, secara langsung mengancam ketersediaan sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Semua itu merupakan bagian dari spektrum ancaman yang harus ditanggulangi melalui pendekatan *human security*. Dengan begitu, diperlukan pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keamanan masyarakat untuk bisa hidup dengan perasaan nyaman dan tenang.

Di Indonesia sendiri, banyak masyarakat yang bergantung terhadap kesediaan sumber daya alam demi keberlangsungan hidupnya. Mata pencaharian masyarakat Indonesia sebagian besar didominasi oleh agraris serta kemaritiman. Kebersihan tanah sangat diperlukan untuk keperluan ladang sawah serta Perkebunan, serta nelayan yang mengharap terjaminnya kondisi kelautan untuk bisa mendapatkan ikan. Ditinjau dari budaya konsumerisme terhadap *fast fashion*, banyak dampak buruk yang dihasilkan dari budaya konsumtif serta produksi *fast fashion* yang masif terhadap kesehatan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang digunakan oleh produksi industri *fast fashion* akan berdampak pada kesenjangan ketersediaan alam dengan kebutuhan manusia untuk hidup. Hal ini merupakan dampak dari pola konsumsi masyarakat yang mengalami kenaikan signifikan, terutama dengan maraknya budaya konsumerisme yang dipicu oleh hadirnya tren *fast fashion*. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kelestarian lingkungan. Industri *fast fashion* dikenal sebagai salah satu penyumbang besar limbah dan emisi karbon, di mana produksi massalnya membutuhkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi fosil. Proses pewarnaan kain, penggunaan bahan sintesis, dan sistem distribusi globalnya secara kolektif menciptakan tekanan ekologis yang sangat besar.

Dengan berkurangnya ketersediaan sumber daya alam sebagai penunjang kehidupan, secara tidak langsung keamanan masyarakat dapat terancam. Industri *fast fashion* yang berproduksi dengan cepat sangat bergantung terhadap bahan baku yang murah dan mudah diperoleh, contohnya rayon. Rayon diperoleh dari selulosa kayu, produksi dari bahan tersebut tidak jarang akan menyebabkan penebangan pohon tropis, terutama di Indonesia. Manusia dan hutan memiliki hubungan yang unik, dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem hutan itu sendiri (Nurrani & Tabba, 2013, p. 5). Produksi dari industri *fast fashion* sering kali menjadi alasan deforestasi besar-besaran yang merusak ekosistem dari hutan tersebut. Dengan berkurangnya pohon sebagai bahan baku untuk kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan, masyarakat akan sulit untuk mendapatkan bahan baku dalam membuat rumah untuk ditinggali serta akan mengalami kesulitan untuk pembangunan infrastruktur. Produksi dari industri *fast fashion* juga lekat dengan pencemaran air. Produksi serta pembuangan limbah tekstil yang masif ke laut akan berdampak terhadap kesehatan laut. Limbah tekstil seringkali mengandung kandungan mikroplastik yang berbahaya terhadap lingkungan. Bagi ekosistem laut mikroplastik dapat merusak tatanan mata rantai makanan karena dapat mengurangi populasi ikan-ikan kecil, bahkan predator puncak. Hal ini disebabkan karena kandungan beracun dalam mikroplastik yang merusak fungsi utama yang biasanya menopang kesehatan dan keanekaragaman hayati (Andarini & dkk, 2023, p. 9). Selain berbahaya terhadap ekosistem laut, nelayan juga akan



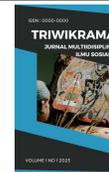
dirugikan dengan berkurangnya populasi laut. Hal ini disebabkan oleh para nelayan yang bergantung kepada populasi ikan untuk menunjang biaya kehidupannya sehari-hari.

Akibat dari eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus dan tidak terkendali adalah munculnya ketidakstabilan yang semakin lebar antara *supply* dan *demand* antara sumber daya alam dengan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana korelasi antara pola produksi dan konsumsi yang tidak berkesinambungan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sistemik. Ketika alam dieksploitasi secara berlebihan tanpa memikirkan implikasinya terhadap lingkungan demi memenuhi dorongan konsumtif yang semakin meningkat, terutama terhadap barang-barang yang bersifat cepat pakai (*disposable*), maka daya dukung lingkungan perlahan-lahan menurun. Aktivitas manusia yang bertumpu pada kepentingan ekonomi jangka pendek, seperti dalam konteks industri *fast fashion*, secara tidak langsung mengorbankan kestabilan ekologis demi keuntungan sesaat. Ancaman ini kemudian dapat berkembang menjadi isu yang serius ketika disadari bahwa kerusakan alam tidak hanya berdampak secara instan, melainkan bersifat kumulatif dan berkepanjangan. Degradasi tanah, pencemaran air, polusi udara, serta menurunnya keanekaragaman hayati merupakan implikasi nyata dari eksploitasi yang tidak memperhitungkan keseimbangan alam. Dalam konteks ini, kemampuan suatu ekosistem untuk bertahan dan pulih dari tekanan eksternal bisa menjadi rentan. Ketika daya tahan ini melemah, tidak hanya keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal yang terancam, seperti petani, nelayan, dan komunitas tradisional, tetapi juga keseimbangan sistem kehidupan global yang bergantung pada interaksi harmonis antara manusia dan alam.

Lebih jauh lagi, hambatan terhadap keseimbangan ekologis tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keamanan manusia secara komprehensif. Bencana alam, krisis pangan, kelangkaan air bersih, hingga meningkatnya penyakit akibat pencemaran lingkungan merupakan bentuk ancaman nyata yang berakar dari ketimpangan relasi manusia dengan alam. Oleh karena itu, membangun kesadaran kolektif merupakan kewajiban moral. Masyarakat harus merefleksikan kembali pola hidupnya untuk kembali mengadopsi gaya hidup yang lebih bijak, sederhana, dan berorientasi pada kestabilan ekologis. Ini mencakup perubahan dalam cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan membuang barang, serta memperkuat kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan keadilan ekologis. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa lingkungan tetap aman, sehat, dan layak huni untuk generasi saat ini dan yang akan datang, bukan hanya tanggung jawab individu untuk mengubah pola konsumsi mereka menjadi pola yang etis dan berkelanjutan melainkan juga harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, masyarakat sipil, serta lembaga internasional.

D. *Green Theory* sebagai Kritik terhadap Sistem Produksi *Fast Fashion*

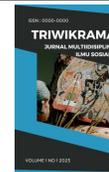
Sebagai pendekatan kritis, *green theory* bukan hanya digunakan untuk menganalisa sebuah masalah, melainkan juga sebagai pemicu untuk terjadinya perubahan. *Green theory* kemudian mengangkat isu mengenai pentingnya keadilan ekologis, maksudnya adalah tanggung jawab dari dampak negatif produksi seringkali dibebankan kepada masyarakat rentan yang justru sama sekali tidak ikut andil dalam industri *fast fashion*. Regulasi terkait pengelolaan limbah industri *fast fashion* di Indonesia sudah diatur dalam beberapa regulasi meski belum memadai karena dalam implementasinya masih menghadapi banyak kendala (Albab & dkk, 2024, p. 8). Kurangnya penegakan hukum serta pengelolaan limbah daur ulang yang lemah menjadi kendala yang masih dihadapi pemerintah Indonesia untuk menanggulangi dampak negatif dari produksi *fast fashion* di Indonesia. Selain masyarakat umum yang mendapat dampak buruk dari produksi industri, para pekerja industri juga merasakan dampak buruk dari proses



produksi produk *fast fashion*. Pekerja di sektor ini terpapar berbagai risiko, mulai dari cedera fisik akibat mesin, paparan bahan kimia berbahaya, hingga kondisi kerja yang tidak ergonomis dan jam kerja berlebihan (Fajriah, 2025, p. 13). Kurangnya pemahaman serta literasi masyarakat terhadap isu konsekuensi membuat masyarakat memilih untuk memilih pekerjaan tanpa melihat dampak buruk yang bisa dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Hal ini kemudian berujung kepada eksploitasi sumber daya manusia yang membuat kesenjangan sosial antara pekerja dengan pemilik industri yang kemudian bisa menjadi pemicu terjadinya konflik sosial.

Di sisi lain, aspek yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian serius dalam regulasi terkait industri *fast fashion* di Indonesia adalah bagaimana pemerintah merespons secara komprehensif dampak negatif yang dihasilkan oleh industri tersebut. Saat ini, kebijakan pemerintah cenderung lebih memprioritaskan pengembangan *fast fashion* sebagai bagian integral dari ekonomi kreatif nasional, yang dilihat sebagai potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan ini kurang berkesinambungan dengan analisis mendalam dan langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menanggulangi efek destruktif dari produksi massal pakaian dengan siklus cepat ini. Akibatnya, dampak lingkungan dan sosial yang merugikan seperti limbah tekstil yang melimpah, eksploitasi tenaga kerja, serta penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan sering kali terlupakan atau tidak mendapat perhatian yang seimbang dalam kebijakan publik. Sebagai bagian dari solusi yang lebih holistik, penting untuk mempertimbangkan penerapan kerangka teori lingkungan, khususnya *green theory*, dalam mengarahkan regulasi dan praktik industri *fast fashion* ke arah yang lebih bertanggung jawab. *Green theory* menolak paradigma ekonomi linear tradisional yang mengutamakan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk meregenerasi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, prinsip ekonomi hijau menekankan perlunya transisi menuju sistem produksi dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

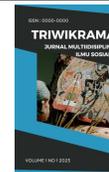
Kebijakan pemerintah mempunyai pengertian yakni keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Hasibuan, 2019, p. 3). Wacana kepentingan umum yang sering kali dijadikan pijakan dalam perumusan kebijakan publik sejatinya tidak selalu bersifat netral atau universal. Dalam praktiknya, kepentingan umum seringkali dimaknai secara sempit dan subjektif, bergantung pada siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikannya. Dengan kata lain, konsep ini sangat rentan digunakan untuk membenarkan keputusan yang secara struktural lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kelompok lainnya. Dalam konteks industri *fast fashion*, misalnya, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi besar dan ekspansi industri seringkali diklaim sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik narasi tersebut, terdapat ketimpangan distribusi manfaat yang nyata antara kelas sosial yang berbeda. Kebijakan yang diklaim sebagai representasi dari kepentingan bersama dapat secara nyata memberikan insentif, kemudahan akses pasar, dan perlindungan hukum kepada pelaku industri besar yang sebagian besar didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas atau investor asing. Kelompok ini mendapatkan keuntungan maksimal dalam bentuk laba, akses terhadap sumber daya, dan dukungan infrastruktur negara. Sementara itu, masyarakat menengah ke bawah, yang sering kali menjadi pekerja di sektor produksi, justru berada di posisi yang paling rentan. Mereka menghadapi tekanan kerja yang tinggi, upah yang rendah, kondisi kerja yang tidak selalu manusiawi, serta paparan langsung terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas industri yang tidak terkendali.



Walaupun begitu, industri *fast fashion* seringkali merespon kritik dari pemikir *green theory* dengan langkah yang kurang tepat. Langkah yang diambil biasanya dengan mengubah bahan-bahan yang semula tidak ramah lingkungan menjadi bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan, tetapi dijual ke publik dengan harga yang tinggi, sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah tidak mampu untuk membeli pakaian yang berbahan lebih ramah lingkungan dan lebih memilih untuk membeli yang lebih murah tetapi tidak ramah lingkungan atau bisa disebut juga dengan *greenwashing*. Hal ini kemudian mempengaruhi kesenjangan sosial menjadi lebih lebar lagi. Sebagaimana dari prinsip industri *fast fashion* itu sendiri, yaitu memproduksi pakaian secara masif serta dengan biaya yang rendah adalah tujuan utama dari hadirnya *fast fashion*. Sehingga pakaian dengan harga yang tinggi menjadi tidak relevan terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Upaya industri *fast fashion* untuk menggunakan bahan produksi yang lebih ramah lingkungan akan menjadi sia-sia apabila masih tetap menggunakan metode komersial yang masif pula. Perlu dilakukan penyuluhan masyarakat untuk memperbaiki cara mengonsumsi pakaian-pakaian jadi agar tidak menjadi berlebihan dan menggunakan pakaian secara berkelanjutan. Para pegiat sosial media atau *influencer* secara tidak langsung ikut serta dalam menaikkan budaya konsumtif dengan cara mengkampanyekan produk-produk dari industri *fast fashion*.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, komunitas dan organisasi masyarakat sipil di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah memainkan peran penting dalam menyuarakan pentingnya perubahan gaya hidup. Kampanye digital dan komunitas lokal yang mendorong konsep *slow fashion*, penggunaan pakaian daur ulang, serta edukasi tentang dampak lingkungan dari konsumsi menjadi contoh konkret bagaimana kekuatan sosial masyarakat dapat menjadi penggerak perubahan. Gerakan ini tidak sekadar reaktif terhadap krisis lingkungan, tetapi juga proaktif dalam menciptakan norma sosial baru yang berpihak pada keberlanjutan. Dalam banyak kasus, komunitas ini muncul secara organik dan berangkat dari keresahan terhadap pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dan keinginan untuk hidup lebih selaras dengan alam. Mereka membangun ruang-ruang diskusi, mengadakan lokakarya, dan memperkuat jejaring solidaritas yang menysasar kelompok muda sebagai agen perubahan. Hal ini mencerminkan transformasi budaya dari bawah yang menekankan pentingnya perubahan sikap, nilai, dan perilaku secara kolektif. Keberadaan gerakan ini menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah atau regulasi formal semata, tetapi juga pada kesadaran kolektif yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Dalam banyak hal, tekanan dari masyarakat sipil justru menjadi katalis bagi pemerintah dan sektor swasta untuk lebih bertanggung jawab dalam aktivitas produksinya. Oleh karena itu, partisipasi aktif komunitas menjadi penting sebagai bentuk pengawasan sosial dan dorongan moral terhadap aktor-aktor dominan dalam sistem ekonomi global.

Masyarakat kini mulai sadar dan aktif dalam mengambil langkah konkret dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang mengatur industri *fast fashion*, sebuah sektor yang dikenal dengan produksi massal pakaian murah namun berdampak besar terhadap lingkungan. Kesadaran ini mendorong individu dan komunitas untuk mencari alternatif yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam hal konsumsi pakaian. Salah satu upaya yang mulai banyak dilakukan adalah dengan beralih menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, seperti serat organik atau daur ulang yang memiliki dampak ekologis jauh lebih kecil dibandingkan bahan sintesis konvensional. Selain itu, banyak pula yang mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan *mindful*, dengan tujuan mengurangi intensitas pembelian pakaian baru dan menekan angka konsumsi yang selama ini sangat tinggi. Kemudian muncullah suatu alternatif cara untuk tetap dapat menuruti gengsi serta tidak ketinggalan *trend fashion*



dan tentunya dapat memenuhi hasrat untuk terlihat *fashionable* tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli barang *branded*. Cara tersebut adalah dengan membeli pakaian bekas (Nugroho, 2023, p. 6). Salah satu tren yang tengah naik daun dan dianggap sebagai solusi inovatif adalah praktik *thrifting*, yaitu membeli pakaian bekas atau *second-hand*. Metode ini tidak hanya menawarkan pilihan *fashion* yang unik dan berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam menekan limbah tekstil yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Dengan memperpanjang masa pakai pakaian melalui pembelian kembali, *thrifting* membantu mengurangi volume sampah tekstil yang selama ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di sektor *fashion*. Selain itu, *thrifting* juga membuka ruang bagi konsumen untuk lebih kreatif dalam memadu-padankan busana tanpa harus selalu bergantung pada produksi baru yang intensif sumber daya.

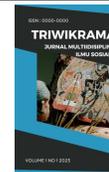
4. SIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan lingkungan di Indonesia semakin kompleks, diperburuk oleh dominasi budaya konsumerisme, terutama dalam sektor *fast fashion* yang mendorong konsumsi berlebihan dan menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar. Konsumerisme, sebagai konstruksi ideologis yang bertentangan dengan prinsip *green theory* yang menekankan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Sayangnya, wacana *green theory* di Indonesia masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh aspek ideologis maupun struktural. Serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak ekologis konsumsi menjadi tantangan utama dalam penerapan pendekatan ini. Diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengaitkan konsumsi, ideologi, dan keberlanjutan lingkungan secara lebih *holistic*.

Penanganan krisis lingkungan akibat konsumerisme memerlukan strategi komprehensif yang berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Aktor-aktor kunci seperti pemerintah, institusi pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu mengintensifkan kampanye yang mengedepankan dampak negatif konsumerisme serta mendorong penerapan praktik konsumsi bertanggung jawab, seperti *slow fashion*, penggunaan produk ramah lingkungan, dan daur ulang. Di samping itu, integrasi prinsip *green theory* dalam perumusan kebijakan publik harus diperkuat, terutama dalam sektor produksi dan konsumsi. Regulasi terhadap industri yang merusak lingkungan perlu diperketat, sementara transformasi gaya hidup menuju kesadaran ekologis harus difasilitasi melalui gerakan sosial berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sistem sosial dan ekologis yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almeisa, K., & dkk. (2024). "Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat". *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN GEOGRAFI*, 2.
- Berlian, N. (2024). "Green Konsumerisme Sebagai Kritik Terhadap Peran Manusia dalam Gerakan Lingkungan". *Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology*, 3.
- Ashri, N., & Putri, S. I. (2022). "PENERAPAN PERSPEKTIF GREEN THEORY DALAM RENEWABLE ENERGY DAN ELECTRICAL VEHICLE (EV) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL". *Jurnal Teknik Mesin*, 6.
- Ramadhan, M. W. (2023). "PERILAKU KONSUMERISME DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS BHAYANGKARA MELALUI MEDIA ONLINE SHOP (SHOPEE)". 3.
- Ruslita, G., & Seran, A. (2024). "Media dan Konsumerisme: Studi Kritis Pahlawan Konsumtif dalam Budaya Populer". *Journal of Mandalika Literature*, 9.



- Hakim, A. L., & Rusadi, E. Y. (2022). "Kritik Globalisasi: Fenomena Fast Fashion Sebagai Budaya Konsumerisme Pada Kalangan Pemuda Kota Surabaya". *AL MA'ARIEF: JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL DAN BUDAYA*, 4.
- Basiroen, V. J., Wahidiyat, M. P., & Anjanette. (2023). "DAMPAK LINGKUNGAN DARI FAST FASHION: MENINGKATKAN KESADARAN DI KALANGAN MILENIAL MELALUI MEDIA SOSIAL". *Jurnal Dimensi DKV: Seni Rupa dan Desain*, 14.
- Zahrawati, F., & Faraz, N. J. (2017). "Pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi keluarga terhadap perilaku konsumtif siswa". *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 131-141.
- Albab, W. U., & dkk. (2024). "Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2.
- Safitri, I. (2025). "DAMPAK FAST FASHION TERHADAP PEREMPUAN DAN LINGKUNGAN: ANALISIS EKOFEMINISME". *Journal of Science and Social Research*, 4.
- Majid, Q. L., & Tidore, M. D. (2024). "ANALISIS PERAN SEKTOR KEMARITIMAN DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY NASIONAL DI INDONESIA". *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.
- Leman, F. M., & dkk. (2020). "DAMPAK FAST FASHION TERHADAP LINGKUNGAN". *In Seminar nasional envisi*, 7.
- Munir, M. I. (2023). "CORAK PARADIGMA ETIKA LINGKUNGAN: ANTROPOSENTRISME, BIOSENTRISME DAN EKOSENTRISME". *Jurnal Yaqzhan*, 8-9.
- Sande, J. P. (2021). "Aspek Human Security dalam Pembatasan Masuknya Orang Asing ke Indonesia karena Pandemi Covid-19". *Indonesian Perspective*, 7.
- Nurrani, L., & Tabba, S. (2013). "PERSEPSI DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA ALAM TAMAN NASIONAL AKETAJAWE LOLOBATA DI PROVINSI MALUKU UTARA". *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5.
- Andarini, C., & dkk. (2023). "PERAN UNI EROPA DALAM MENANGANI PENCEMARAN AIR AKIBAT LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL TERHADAP EKOSISTEM PERAIRAN". *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9.
- Albab, W. U., & dkk. (2024). "Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 8.
- Fajriah, I. (2025). "Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Fast Fashion: Analisis Literatur Tentang Risiko dan Tantangan". *Klinik: Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 13.
- Hasibuan, A. S. (2019). "PERANAN EKOLOGI PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3.
- Nugroho, L. S. (2023). "Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 6.